

Analisis pengaruh Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Jawa Tengah

Zadiva Marta Angga Saputra, Prastowo*

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: prastowo@uii.ac.id

JEL Classification Code:

H72, O15, I32

Kata kunci:

Dana Desa; IPM; Kemiskinan.

Email penulis:

21313005@students.uii.ac.id

DOI:

[10.20885/JKEK.vol5.iss1.art16](https://doi.org/10.20885/JKEK.vol5.iss1.art16)

Abstract

Purpose – This research aims to analyze the effect of village funds (dana desa) and the Human Development Index (HDI) on poverty in Central Java Province.

Methods – The data used are secondary panel data from 29 regencies in Central Java for the 2017-2023 period. The data analysis method uses panel data regression.

Findings – The study results indicate that village funds and the Human Development Index (HDI) have a significant negative effect on poverty in Central Java.

Implication – The policy governing the use of village fund allocations focuses on productive infrastructure that supports the rural economy. Furthermore, greater emphasis is placed on ensuring equitable human resource quality by providing access to education and revitalizing basic health services.

Originality – This study contributes to poverty alleviation policies through village funds and improving the HDI.

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Metode – Data yang digunakan data sekunder dalam bentuk data panel dengan 29 Kabupaten yang ada di Jawa Tengah periode 2017-2023. Metode analisis data menggunakan regresi data panel.

Temuan – Hasil studi menunjukkan bahwa dana desa dan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Implikasi – Kebijakan penggunaan alokasi dana desa fokus pada infrastruktur produktif penunjang ekonomi perdesaan. Selanjutnya, perhatian lebih pada pemerataan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan aksesibilitas pendidikan dan revitalisasi layanan kesehatan dasar.

Orisinalitas – Penelitian ini berkontribusi terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan melalui dana desa dan peningkatan IPM.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan tantangan utama dalam pembangunan ekonomi yang memerlukan perhatian mendalam, baik pada skala nasional maupun internasional. Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki jumlah penduduk cukup besar di Indonesia, menjadi salah satu fokus penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, menghadapi masalah kemiskinan yang signifikan. Upaya pemerintah Jawa Tengah dalam mengatasi kemiskinan perlu ditingkatkan dengan fokus pada peningkatan akses pendidikan, penciptaan peluang ekonomi, dan evaluasi distribusi sumber daya (Danuarsa, 2024). Salah satu ukuran keberhasilan program pembangunan adalah angka kemiskinan yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan menjadi langkah penting untuk menyusun strategi pengentasan yang tepat sasaran.

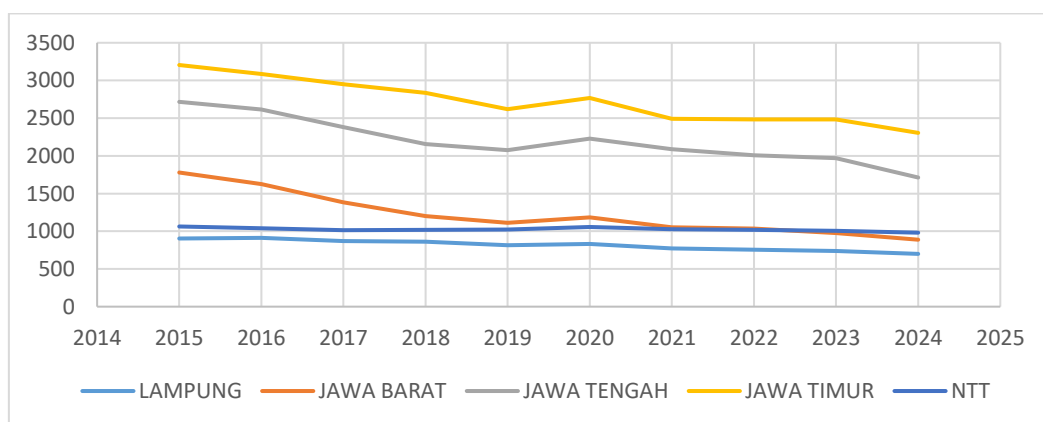
Salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui kebijakan alokasi dana desa. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Harapannya, dana desa mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan menekan ketimpangan sosial. Walaupun dana desa telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, kemiskinan tetap menjadi isu yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut, khususnya di Provinsi Jawa Tengah (Widiyanto et al., 2021). Kajian ini berupaya menilai sejauh mana dana desa berhasil mencapai tujuan tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kualitas hidup masyarakat. IPM meliputi tiga dimensi penting, yaitu pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup layak. Peningkatan IPM diharapkan berdampak positif terhadap pengurangan kemiskinan, karena masyarakat yang memiliki kualitas hidup lebih baik cenderung lebih produktif. Di Jawa Tengah, terdapat perbedaan signifikan dalam nilai IPM antarwilayah, yang mengindikasikan adanya kesenjangan dalam kualitas pembangunan manusia. Kajian mengenai pengaruh IPM terhadap kemiskinan sangat diperlukan untuk memahami keterkaitan antara kedua variabel tersebut. Peningkatan IPM memiliki pengaruh positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah (Andhykha et al., 2018).

Tingkat pengangguran merupakan faktor lain yang memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran menunjukkan adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap pekerjaan, yang berujung pada rendahnya pendapatan dan meningkatnya ketimpangan ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia (Ilham & Octaviani, 2024). Penelitian mengenai hubungan antara tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat memberikan masukan berharga untuk menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi suatu wilayah dan kerap digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PDRB terbukti memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, tetapi pengurangan pengangguran belum bisa mengurangi kemiskinan (Martini & Woyanti, 2023). Fenomena ini menandakan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menganalisis keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan pada level daerah.

Secara umum sejak tahun 2015-2024 tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren negatif, ini menandakan bahwa masyarakat semakin mampu dan produktif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, dimulai pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara luas.

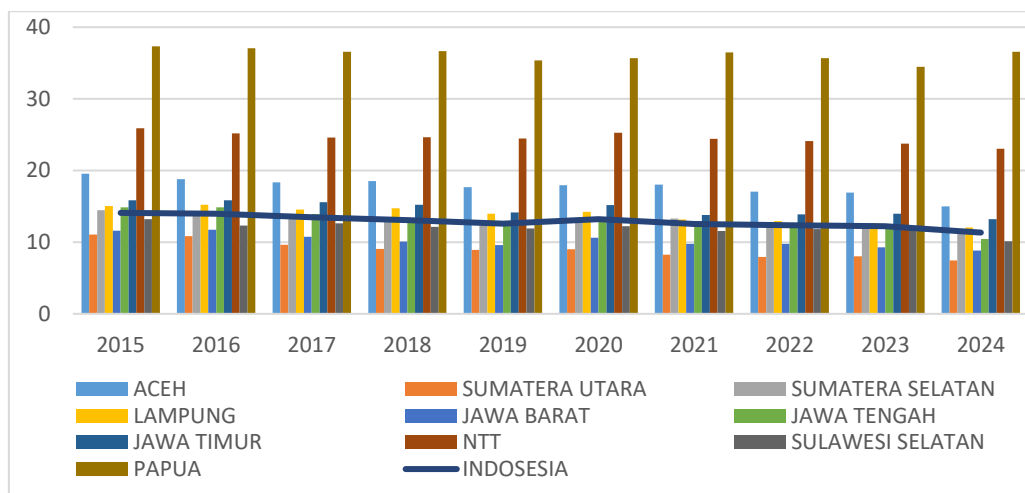


Gambar 1. Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbesar di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistika (2025)

Gambar 1 menunjukkan grafik antar provinsi, provinsi Jawa Tengah berada di posisi ke-2 dengan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia. Walaupun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk menekan angka kemiskinan, hasil yang dicapai di Jawa Tengah menunjukkan variasi yang

cukup besar. Kajian mengenai berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, seperti pendidikan, ekonomi, lokasi, dan IPM, untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif (Danuarsa, 2024).

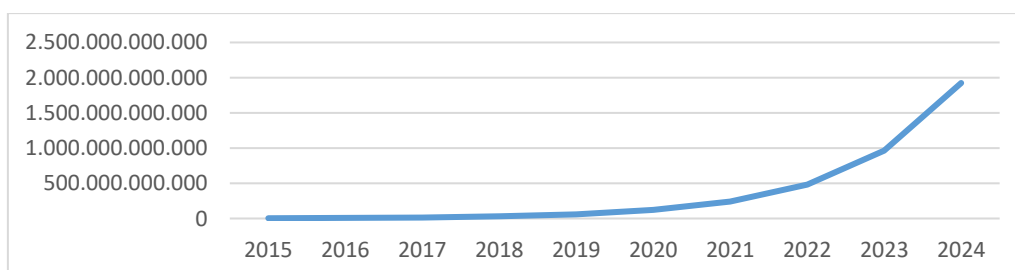
Sebagai salah satu provinsi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mengurangi angka kemiskinan. Upaya pemerintah Jawa Tengah untuk mengurangi kemiskinan membutuhkan peningkatan koordinasi antarinstansi dan fokus pada akses pendidikan, peluang ekonomi, dan distribusi sumber daya (Danuarsa, 2024). Namun, pencapaian ini membutuhkan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan serta pelaksanaan kebijakan yang efektif. Penelitian ini tidak hanya relevan untuk konteks Jawa Tengah, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi daerah lain dengan karakteristik serupa. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.



Gambar 2. Tingkat Kemiskinan 10 Provinsi Terbesar di Indonesia Menurut Presentase Penduduk Miskin

Sumber: Badan Pusat Statistika (2025)

Gambar 2 menunjukkan grafik antar provinsi, provinsi Jawa Tengah berada di posisi ke-7 dengan Presentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia. Pada data tersebut juga tercantum nilai Presentase Penduduk Miskin dalam skala nasional, dengan indikator atau garis berwarna biru tua, dalam artian di Indonesia presentase penduduk miskin masih banyak yang di atas rata-rata. Persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah masih berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di provinsi ini menunjukkan tren fluktuatif, dengan penurunan dan kenaikan yang terjadi dari tahun 2015 hingga 2024.



Gambar 3. Total Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah pada Periode 2015-2024

Sumber: DJPK Kemenkeu

Pemerintah Indonesia menginisiasi program pengentasan kemiskinan pada tahun 2015, yang sejalan dengan visi Nawacita. Visi Nawacita adalah visi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diusung sejak periode pertama, berisi sembilan agenda prioritas pembangunan nasional. Nawacita berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti "sembilan cita-cita" atau tujuan. Nawacita,

visi pembangunan Presiden Joko Widodo, bertujuan untuk mengubah paradigma pembangunan Indonesia dari pertumbuhan menjadi pembangunan yang berkelanjutan dan adil (Syamsi, 2018). Dari tahun 2015 hingga 2019, kemiskinan dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah. Namun, pada tahun 2020-2021 terjadi lonjakan angka kemiskinan yang dipicu oleh pandemi Covid-19.

Dana Desa adalah anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota. Dana ini diarahkan untuk mendukung pembangunan desa serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat. Berdasarkan data dalam Gambar 3. DJPK Kemenkeu menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah anggaran dana desa di Jawa Tengah. Ini terjadi karena semakin bertambahnya desa di Indonesia maka semakin banyak juga jumlah dana desa yang dianggarkan setiap tahunnya.

Dana Desa telah menciptakan beragam output infrastruktur desa yang berkontribusi pada pembangunan, seperti jalan desa, jembatan, pasar desa, BUMDesa, tambahan perahu, embung, irigasi, raga desa, air bersih, MCK, Polindes, drainase, PAUD, posyandu, sumur, dan penahan tanah. Selain itu, terdapat juga capaian *outcome* yang positif, seperti penurunan jumlah penduduk miskin, Persentase total penduduk miskin dan gini rasio di wilayah desa menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa (Permatasari, 2024).

Berbagai penelitian telah membahas berbagai faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia melalui pendekatan dan variabel yang beragam. Penelitian oleh (Andykha et al., 2018) menunjukkan bahwa PDRB dan tingkat pengangguran memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, sementara IPM berpengaruh negatif. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran secara signifikan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (Deswari et al., 2023). Sebaliknya, studi oleh (Rusdi, 2023) menemukan bahwa di Sulawesi Selatan, IPM tidak secara signifikan memengaruhi kemiskinan, meskipun berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup penduduk. Penelitian oleh (Anggraini et al., 2023) mengidentifikasi bahwa pengangguran tinggi di Sumatera meningkatkan ketimpangan ekonomi dan beban program kesejahteraan, sehingga solusi yang direkomendasikan meliputi penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Penurunan tingkat pengangguran dapat secara signifikan membantu mengurangi angka kemiskinan (Utami & Udjianto, 2023).

Penelitian lain menyoroti peran penting dana desa dan kebijakan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Studi (Rahman & Arifin., 2022) mengungkapkan bahwa dana desa berkontribusi signifikan dalam menurunkan kemiskinan di daerah pedesaan sekaligus mendorong peningkatan PDRB. Penelitian oleh (Handayani, 2024) juga menegaskan bahwa IPM secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, sedangkan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak signifikan hanya secara bersama-sama. Keseluruhan penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Sebagai penutup, penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis pengaruh dana desa, IPM pada kemiskinan di Jawa Tengah. Melalui pendekatan empiris, studi ini bertujuan untuk memahami hubungan antarvariabel tersebut sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang strategis. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu menyusun langkah-langkah pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Metode Penelitian

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 35 daerah otonom (29 kabupaten dan 6 kota). Penyaluran dana desa secara spesifik ditujukan untuk wilayah setingkat desa di 29 kabupaten sedangkan wilayah kota tidak mendapatkan alokasi dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dalam bentuk data panel dengan *cross section* 29 Kabupaten yang ada di Jawa Tengah dan data *time series* periode 2017-2023. Variabel data yang digunakan adalah Kemiskinan, Dana Desa, IPM, Tingkat Pengangguran, dan Produk Domestik Regional Bruto. Sumber utama data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik, sedangkan

data tambahan diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Variabel dependen yang digunakan adalah kemiskinan yang diukur dengan jumlah penduduk kemiskinan pada 29 Kabupaten di Jawa Tengah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Pada penelitian ini fokus utama variabel independen yaitu dana desa dan IPM sedangkan PDRB dan Pengangguran dimasukkan sebagai variabel kontrol merujuk pada penelitian (Andykha et al., 2018). Penyertaan variabel kontrol tersebut didasarkan pada PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah. Memasukan PDRB sebagai variabel kontrol memastikan apakah penurunan kemiskinan didorong oleh dana desa atau dampak dari pertumbuhan ekonomi daerah. Pengangguran dimasukkan sebagai variabel kontrol karena pengangguran menjadi hulu dari kemiskinan, ketika seseorang kehilangan pendapatan akan jatuh ke garis kemiskinan.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber
Kemiskinan	KMSKN	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik
Dana Desa	DD	Miliar Rupiah (Rp)	DJPK Kemenkeu
Indeks Pembangunan Manusia	IPM	Indeks	Badan Pusat Statistik
Tingkat Pengangguran	TP	Persen (%)	Badan Pusat Statistik
Produk Domestik Regional Bruto	PDRB	Triliun Rupiah (Rp)	Badan Pusat Statistik

Dana desa merupakan sumber pendanaan dari pemerintah pusat melalui alokasi dana APBN pemerintah mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa (Sasongko, 2020). Dana Desa yang digunakan dalam penelitian adalah total dari keseluruhan data per kecamatan di wilayah Jawa Tengah, dan data dana desa dalam penelitian ini diambil dari total di setiap kabupaten di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari DJPK Kementerian Keuangan. Dalam penelitian ini, variabel Dana Desa merujuk pada Widiyanto et al., (2021) yang menjelaskan bahwa alokasi dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan, namun membutuhkan pengawasan yang baik serta partisipasi aktif dari masyarakat.

IPM adalah indikator yang membandingkan angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Data yang dianalisis meliputi total IPM di setiap kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan didapatkan pada Badan Pusat Statistik (BPS). Pada penelitian ini, variabel IPM mengacu pada jurnal Handayani yang menyebutkan bahwa Peningkatan IPM mencerminkan akses masyarakat yang lebih baik terhadap pendidikan, yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dan layak (Handayani, 2024).

Tingkat Pengangguran adalah persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja dalam suatu wilayah atau negara. Namun, dalam penelitian ini penulis menggunakan data menurut Jumlah Penduduk di wilayah Jawa Tengah per kabupaten. Pada penelitian ini, variabel Tingkat Pengangguran mengacu pada jurnal Utami yang menyebutkan bahwa penciptaan lapangan kerja terutama di sektor produktif turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Penurunan tingkat pengangguran dapat secara signifikan membantu mengurangi angka kemiskinan (Utami dan Udjianto, 2023).

PDRB menggambarkan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data PDRB harga konstan per kabupaten di Jawa Tengah, yang bersumber dari BPS. Variabel PDRB dalam studi ini merujuk pada penelitian Andykha et al., (2018), yang menyatakan bahwa sektor-sektor utama seperti pertanian, industri, dan perdagangan, yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat (Andykha et al., 2018).

Berikut merupakan model persamaan penelitian ini:

$$KMSKN_{it} = \beta_0 + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TP_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + e_{it}$$

Dimana

KMSKN = Kemiskinan,

DD = Dana Desa,

IPM = Indeks Pembangunan Manusia,

TP = Tingkat Pengangguran,
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang menggabungkan antara data *cross-section* dengan data *time-series*. Dalam melakukan regresi data panel, perlu dilakukan beberapa uji untuk menentukan model yang akan dipilih dalam regresi data panel melalui Uji *Chow Test* dan Uji *Hausman Test*. Uji *Chow* untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. langkah berikutnya adalah menjalankan uji Hausman. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah *fixed effect model* atau *random effect model*.

Hasil dan Pembahasan

Rata-rata jumlah penduduk miskin di 29 Kabupaten di Jawa Tengah selama periode penelitian 2017- 2023 mencapai 130,549 ribu jiwa per tahun. Nilai tengah jumlah penduduk miskin adalah 115,140 ribu jiwa, dengan angka maksimum mencapai 343,460 ribu jiwa dan minimum 58,00 ribu jiwa. Standar Deviasi sebesar 56,40 ribu jiwa menunjukkan adanya fluktuasi data kemiskinan yang cukup besar selama periode tersebut.

Tabel 2 Analisis Deskriptif

	KMSKN	DD	IPM	TP	PDRB
Mean	130,548	262,77	71.25	4.87	26,832
Median	115,140	250,00	70.79	4.50	22,000
Maximum	343,460	496,00	78.65	9.97	102,000
Minimum	58,00	104,00	64.86	1.76	12,000
Std. Dev.	56,398	81,77	2.90	1.85	17,398

Sumber: data diolah

Dana Desa rata-rata dalam penelitian ini adalah 262,77 miliar rupiah per tahun. Nilai median tercatat sebesar 250,00 miliar rupiah, dengan nilai tertinggi mencapai 496,00 miliar rupiah dan nilai terendah sebesar 104,00 miliar rupiah. Standar Deviasi sebesar 81,77 miliar rupiah mengindikasikan fluktuasi yang cukup besar dalam distribusi Dana Desa selama periode penelitian. IPM rata-rata sebesar 71.25 per tahun selama periode penelitian. Nilai tengahnya adalah 70.9, dengan nilai maksimum mencapai 78.65 dan nilai minimum 64.86. Standar Deviasi sebesar 2.90 menunjukkan bahwa data IPM relatif stabil tanpa fluktuasi signifikan dalam periode tersebut.

Tingkat pengangguran rata-rata selama 2017-2023 mencapai 4.87% per tahun. Nilai tengah tingkat pengangguran adalah 4.50%, dengan nilai tertinggi 9.97% dan nilai terendah 1.76%. Standar Deviasi sebesar 1.85% menunjukkan stabilitas data tingkat pengangguran dengan fluktuasi yang tidak signifikan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) rata-rata mencapai 26,832 triliun rupiah per tahun selama periode penelitian. Nilai tengahnya adalah 22,000 triliun rupiah, dengan nilai tertinggi mencapai 102,000 triliun rupiah dan nilai terendah 12,000 triliun rupiah. Standar Deviasi sebesar 17,398 triliun rupiah menunjukkan bahwa data PDRB mengalami fluktuasi yang cukup besar selama periode tersebut.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi dengan Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	330.116	62.444	5.286	0.0000
DD	-0.084	0.024	-3.490	0.0006
IPM	-2.184	1.060	-2.059	0.0410
TP	1.913	0.674	2.835	0.0051
PDRB	-1.153	0.537	-2.147	0.0332
R-Squared	0.983			
Adjusted R-squared	0.980			
F-statistic	320.645			0.0000
Chow test	677.369			0.0000
Hausman test	37.715			0.0000

Berdasarkan pengujian untuk pemilihan model melalui Uji *Chow Test* dan Uji *Hausman Test*. Uji *Chow* untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model* dengan melihat probabilitas *Chow test* sebesar 0.0000, yang lebih kecil dari nilai α sebesar 0.05 (5%) maka didapatkan model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model*. langkah berikutnya adalah menjalankan uji Hausman. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah *fixed effect model* atau *random effect model* dengan melihat probabilitas *Hausman test* sebesar 0.0000, yang lebih kecil dari nilai α sebesar 0.05 (5%) maka didapatkan model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model*. Berdasarkan Uji *Chow Test* dan Uji *Hausman Test*, maka didapatkan model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model*.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Melalui dana desa pemerintah daerah setempat bisa mengalokasikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Pembangunan infrastruktur di desa tertinggal dapat meningkatkan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota (Arnangngi et al., 2024). Hal ini sejalan dengan asumsi awal bahwa dana desa memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Peningkatan jumlah dana desa setiap tahun diharapkan dapat menurunkan kemiskinan.

IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2024), yang juga menyimpulkan bahwa IPM secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di wilayah Jawa Tengah. IPM mencakup tiga indikator utama yang mencerminkan standar kebutuhan hidup, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkontribusi pada peningkatan produktivitas dalam mendapatkan pekerjaan, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan individu. Peningkatan pendapatan memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mencapai kesejahteraan, dan secara tidak langsung mengurangi tingkat kemiskinan. Kebijakan pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (Cholily, 2024). Dengan langkah tersebut, sinergi antara peningkatan IPM dan pengurangan kemiskinan dapat menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andykha et al., 2018), yang menyatakan PDRB dan Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Tingkat pengangguran berpengaruh langsung terhadap kemiskinan karena ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, ia kehilangan sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Kondisi ini menurunkan daya beli, meningkatkan ketergantungan pada bantuan pemerintah, dan memperbesar risiko rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pengangguran dalam suatu wilayah, maka semakin besar pula jumlah penduduk yang rentan mengalami kemiskinan akibat kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan produktif.

PDRB diketahui memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Rahman & Arifin, 2022), yang menyatakan bahwa Dana Desa berperan signifikan dalam menurunkan kemiskinan di daerah pedesaan sekaligus mendorong peningkatan PDRB. PDRB memengaruhi kemiskinan karena merepresentasikan total nilai tambah dari seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Peningkatan PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lebih banyak peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kenaikan PDRB memiliki potensi untuk menurunkan kemiskinan dengan memberikan masyarakat peluang ekonomi yang lebih luas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, efek ini bergantung pada seberapa merata pertumbuhan tersebut dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Kesimpulan dan Implikasi

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dana desa memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Alokasi fiskal melalui Dana Desa

yang ditrasfer langsung ke tingkat desa efektif dalam memenuhi infrastruktur dasar dan menstimulus pendapatan masyarakat miskin di perdesaan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan pilat penting dalam memutus rantai kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah disarankan untuk penggunaan alokasi dana desa fokus pada infrastruktur produktif penunjang ekonomi perdesaan. Selanjutnya, perhatian lebih pada pemerataan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan aksesibilitas pendidikan berupa beasiswa bagi masyarakat kurang mampu dan revitalisasi layanan Kesehatan dasar berupa peningkatan fasilitas dan insentif tenaga Kesehatan di puskesmas pembantu.

Daftar Pustaka

- Andhykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 113-123.
- Anggraini, D., Fasa, M.I., & Suharto (2023). Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Tirtayasa Ekonomika*, 18(1), 124-138.
- Arnangngi, R., Tajuddin, M. S., & Andriani, A. (2024). Analisis Keteringgalan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Talimbung Kecamatan Tandukkalua Kabupaten Mamasa. *Journal Peguruang: Conference Series*, 6(2), 911-916.
- Rahman, M.D.F., & Arifin, K.K. (2022). Pengaruh Dana Desa Terhadap Modal Sosial Dalam Kemiskinan Di Perdesaan: PLS SEM. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 1(2), 81-96.
- Danuarsa, A. Y. (2024). Analisis Upaya Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2022. *Jurnal Informatika Upgris*, 10(1), 56–62.
- Deswari, P. N. N., Jayawarsa, A. A. K., & Wulandari, I. G. A. A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Jumlah Penduduk yang Menganggur Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2016-2020. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 6(2), 63–71.
- Dwi Utami, D., & Welly Udjiyanto, D. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(7), 637–646.
- Handayani, N. (2024). Pengaruh Ipm, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(1), 26–36.
- Hania Cholily, V. (2024). Analisis Kebijakan Program Pendidikan dan Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(5), 1062-1072.
- Ilham, A. N., & Dian Octaviani. (2024). Analisis Peran Faktor-Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 771–780.
- Martini, D., & Woyanti, N. (2023). Analisis Pengaruh Pdrb, Ipm, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 35 Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (2016-2020). *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 5(2), 23-32.
- Permatasari, A. E. (2024). Signifikansi Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Membangun Desa. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 5(2), 37-50.
- Restu Widyo Sasongko. (2020). Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Rangka Mengoptimalkan Pembangunan Desa. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 11(4), 455–462.

- Rusdi, M. (2023). Pengaruh Index Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Economics and Digital Business Review*, 4, 971–981.
- Syamsi, S. S. (2018). Nawa Cita Jokowi-JK dalam Paradigma Pembangunan Ekonomi. *SOIJST Vol. 1 (1):73-102*.
- Widiyanto, D., Istiqomah, A., & Yasnanto, Y. (2021). Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 26-33.